

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2026

BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Manual IKU ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan kinerja organisasi guna mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini memuat definisi operasional indikator, metode penghitungan, satuan pengukuran, sumber data, serta mekanisme pelaporan yang menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pengukuran kinerja. Dengan adanya manual ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang seragam sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan dinamika organisasi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual IKU ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi.

Lampung, 15 Januari 2026

Kepala BBPBL Lampung



Mulyanto, ST, M.Si

DAFTAR ISI

IKU 1	Peralatan laboratorium pengujian penyakit ikan dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung	1
IKU 2	Calon induk unggul ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung	2
IKU 3	Benih ikan air laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung	3
IKU 4	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung	4
IKU 5	Sampel uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan ikan air laut oleh BBPBL Lampung	5
IKU 6	Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung	6
IKU 7	Sampel surveillance resistensi antimikroba (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung	7
IKU 8	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung	8
IKU 9	Sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke Masyarakat oleh BBPBL Lampung	9
IKU 10	Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung	10
IKU 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung	11
IKU 12	Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung	12
IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung	13
IKU 14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung	20
IKU 15	Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung	22
IKU 16	Nilai pengawasan kearsipan internal BBPBL Lampung	26
IKU 17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung	27
IKU 18	Indeks pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung	28

IKU 19	Pelayanan keterbukaan informasi publik satker BBPBL Lampung	31
IKU 20	Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung	32
IKU 21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK	33
IKU 22	Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung	34

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengelola kinerja secara terukur. Salah satu instrumen utama dalam sistem manajemen kinerja adalah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penyusunan Manual IKU ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Manual IKU disusun sebagai pedoman dalam perumusan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi indikator kinerja agar pelaksanaannya konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Maksud dan Tujuan

- 2.1. Manual IKU ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh unit kerja dalam :
 - a. Memahami definisi dan konsep setiap IKU yang ditetapkan.
 - b. Menjamin keseragaman pemahaman dalam pengukuran kinerja.
 - c. Menetapkan metode penghitungan yang jelas dan terstandar.
 - d. Menentukan sumber data dan penanggung jawab pengukuran.
 - e. Mendukung penyusunan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel.

- 2.2. Adapun tujuan penyusunan Manual IKU adalah untuk memastikan bahwa setiap indikator :
- a. Relevan dengan sasaran strategis;
 - b. Dapat diukur secara objektif;
 - c. Memiliki rumus penghitungan yang jelas;
 - d. Memiliki target yang realistis dan menantang;
 - e. Dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dengan penyusunan manual Indikator Kinerja Utama BBPBL Lampung 2026 adalah :

- a. Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan bidang perikanan budidaya disemua jenjang pelaksanaan.
- c. Terukurnya output yang dihasilkan sesuai sasaran yang telah ditetapkan
- d. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

4. Ruang Lingkup

Manual IKU ini mencakup:

1. Uraian definisi operasional setiap indikator kinerja utama.
2. Formula atau metode penghitungan indikator.
3. Satuan pengukuran dan target kinerja.
4. Sumber data dan periode pelaporan.
5. Penanggung jawab pengumpulan dan validasi data.
6. Mekanisme monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

5. Dasar Hukum

Penyusunan Manual IKU ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan internal instansi terkait perencanaan dan pengukuran kinerja

PERJANJIAN KINERJA BBPBL LAMPUNG 2026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	1. Perelatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung (unit)	1
2.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya ikan air laut	2. Calon Induk Unggul ikan Laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	250
		3. Benih ikan Laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung (ekor)	102.436
		4. Benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (ekor)	1.324.631
		5. Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Laut oleh BBPBL Lampung (Sampel)	200
		6. Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	160
3.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya ikan air payau	7. Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji oleh BBPBL Lampung (sampel)	75
		8. Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPBL Lampung (kg)	0.211
4.	Terkecilnya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	9. Sarana perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (unit)	35
5.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya rumput laut	10. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat oleh BBPBL Lampung (kg)	9.463
6.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung	11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BBPBL Lampung (Persen)	86
		12. Penilaian Mandiri SAKIP BBPBL Lampung (Nilai)	84,2
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	92,1
		14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBPBL Lampung (nilai)	71,75
		15. Indeks Profesionalitas ASN BBPBL Lampung (nilai)	81,5
		16. Nilai Pengawasan kearsipan satker BBPBL Lampung (Nilai)	81
		17. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang dimumkan pada SIRUP satker BBPBL Lampung (Persen)	77
		18. Indeks Pengelolaan SDM satker BBPBL Lampung (Nilai)	4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
19.		Pelayanan keterbukaan informasi publik satker BBPBL Lampung (Nilai)	261
20.		Persentase layanan perkantoran satker BBPBL Lampung (Persen)	100
21.		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja yang berpredikat menuju WBK (nilai)	70
22.		Indeks layanan perpustakaan satker BBPBL Lampung (Indeks)	3

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya ikan air tawar	70.500.000
2.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya ikan air laut	6.751.059.000
3.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya ikan air payau	70.000.000
4.	Terkecilnya sistem prasarana dan sarana perikanan budi daya	7.395.270.000
5.	Terkecilnya sistem perikanan budi daya rumput laut	446.692.000
6.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup BBPBL Lampung	19.620.780.000
Total Anggaran BBPBL Lampung		34.354.301.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



TB. Haeru Rahayu


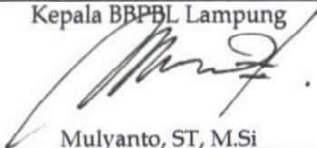
Pihak Pertama
Kepala BBPBL Lampung



Mulyanto

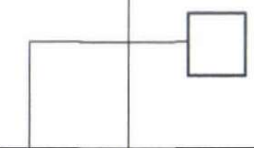

METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

1. Standar Operational Procedure (SOP) pengukuran Indikator Kinerja BBPBL Lampung

	Nomor SOP	: B.375/BBPBL/OT.310/II/2025
	Tanggal pembuatan	: 5 Pebruari 2025
	Tanggal revisi	:
	Tanggal efektif	: 5 Pebruari 2025
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;"> Kepala BBPBL Lampung  Mulyanto, ST, M.Si </div>
	Nama SOP	: PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009	1. Minimal D3	
2. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011	2. Memahami kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan instansi pemerintah	
3. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011		
4. Peraturan MENPAN No PER 21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan SOP Adm Pemerintah		
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman penyusunan POS lingkup KKP		
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 tahun 2021		
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan :	
	1. ATK	
	2. Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Kontrol dokumen	

**Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			
		Ka BBPBL	Tim pengelola kinerja	Operator KINERJAKU	Kelengkapan	waktu	Output	Ket
1.	Ka. Balai menerima PK Indikator Kinerja Utama BBPBL Lampung yang telah ditandatangani oleh Dirjen PB	○			PK	30 menit	PK	
2.	Tim pengelola kinerja menyusun dokumen kinerja, termasuk manual IKU yang berisi cara pengukuran per IKU dan telah disahkan oleh Ka. Balai		□		PK, RKAKL	3 hari	Dokumen kinerja	
3.	Tim kinerja menyusun capaian kinerja dan data dukungnya, dan cara pengukurannya sesuai dengan manual IKU		□		Data capaian IKU, PK	1 minggu	Data dukung capaian IKU	
4.	Tim kinerja melaporkan hasil capaian kinerja kepada Ka. Balai		□		Data hasil capaian	15 menit	Data hasil capaian	
5.	Ka. Balai menyampaikan hasil capaian kinerja pada rapat Money keuangan dan kegiatan	□			Power point data hadil capaian IKU	1 jam	Data hasil capaian	
6.	Operator KINERJAKU menginput data dan data dukung pada aplikasi KINERJAKU			□	Data hasil capaian	180 menit	Aplikasi KINERJAKU	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			
		Ka BBPBL	Tim pengelola kinerja	Operator KINERJAKU	Kelengkapan	waktu	Output	Ket
7.	Operator KINERJAKU menyampaikan hasil pengukuran IKU (NPSS) pada aplikasi KINERJAKU kepada Ka. Balai				Aplikasi KINERJAKU	30 menit	Screenshoot capaian NPSS	
8.	Tim kinerja mendokumentasikan seluruh data kinerja dan data dukungnya				Agenda dokumen hasil pengukuran	10 menit	dokumen hasil pengukuran	

**Alur SOP Pengumpulan Data Kinerja
Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku		
		Ka Balai	Kasubag Umum	Katimja	Tim Pengelola Kinerja	Kelengkapan	waktu	Output
1.	Ka Balai memberi perintah untuk mengumpulkan data kinerja (per triwulan)	○				Rencana Kinerja dan IKU	15 menit	Kesediaan dan Arahan
2.	Tim pengelola kinerja berkoordinasi dengan Kasubag Umum dan Ketua Tim Kerja tentang data capaian IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing		m	□	□	Struktur Organisasi	15 menit	Draf tim
3.	Tim kinerja menghimpun data yang telah diperoleh				□	Rencana Kinerja dan IKU	1 hari	Disposisi
4.	Tim kinerja menyusun draf laporan kinerja triwulan beserta dokumen kinerja lainnya				□	Rencana Kinerja dan IKU	1 hari	Data
5.	Ka. Balai memeriksa draf laporan kinerja	□				Data kinerja	5 hari	Konsep laporan
6.	Ka. Balai menandatangani laporan kinerja triwulan	□				Konsep laporan	7 hari	Laporan final

GLOSSARY

1. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan *input* atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* yang diharapkan.
2. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.
3. Indikator adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. Kinerja : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi
5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai
6. Pengukuran kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
7. Pengukuran data kinerja adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
8. Pelaporan data kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilan suatu pembangunan.
9. Sasaran Strategi yang selanjutnya disingkat SS : sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi
10. Peta Strategi : suatu dashboard yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi
11. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA : satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja sehingga berimplikasi pada pencapaian SS
12. Cascading : Proses Penjabaran dan penyelarasan SS, Indikator kinerja dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah

13. Kontrak Kinerja : Dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang target kinerja dalam periode 1 (satu) tahun
14. Penghitungan *Maximize* : Indikator Kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
15. Penghitungan *Minimize* : Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja *minimize* adalah : $(1+(1-\text{realisasi}/\text{target})) \times 100\%$
16. Penghitungan *Stabilize* : Indikator Kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik
17. *Lag Outcome* : pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat *outcome* (hasil dari keluaran)
18. *Lag Output* : pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat *output* (keluaran)
19. *Lead Input* : pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri jenis IKU-nya bersifat *input*
20. *Lead Process* : pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri jenis IKU-nya bersifat proses
21. Adopsi Langsung : langsung menurunkan sasaran strategi, KPI dan Target dari atasan
22. Lingkup Dipersempit : mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing
23. Komponen Pembentuk : memisahkan sasaran strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian
24. Buat Baru : membuat sasaran strategi , KPI dan Target yang baru
25. Akumulasi : IKU lingkup dipersempit dan capaiannya dihitung dari capaian IKU bawahannya
26. Kontribusi : IKU lingkup dipersempit dan capaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IKU dari bawahannya (biasanya untuk komponen pembentuk)
27. Rata-rata : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IKU bawahannya
28. Sama Persis : IKU yang mempunyai metode adopsi langsung
29. Jenjang Pengelola : merupakan penanggungjawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IKU (pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III)

		IK. 1
INDIKATOR KINERJA	:	PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN YANG DISEDIAKAN OLEH BBPBL LAMPUNG (UNIT)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • seluruh perangkat, instrumen, dan sarana teknis yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengujian, analisis, dan diagnosa terhadap sampel ikan, air, pakan, serta media lingkungan perikanan guna mendeteksi penyakit, mengidentifikasi agen patogen, serta menilai kualitas lingkungan perairan. • Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur jumlah dari realisasi peralatan laboratorium
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>capaian = Jumlah peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan oleh BBPBL Lampung</i></p> </div>
SATUAN	:	Unit
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Bantuan Kesehatan Ikan dan Lingkungan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (paket)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	1

		IK. 2
INDIKATOR KINERJA	:	CALON INDUK UNGGUL IKAN LAUT YANG DIPRODUKSI OLEH BBPBL LAMPUNG (EKOR)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah calon induk ikan laut yang diproduksi di KJA oleh BBPBL Lampung • Capaian diukur berdasarkan jumlah produksi calon induk ikan laut
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><i>Capaian = menjumlahkan seluruh produksi calon induk ikan laut</i></p> </div>
SATUAN	:	Ekor
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Produksi dan Bantuan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (ekor)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	250

		IK. 3
INDIKATOR KINERJA	:	BENIH IKAN LAUT YANG DIPRODUKSI OLEH BBPBL LAMPUNG (EKOR)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah benih ikan laut yang diproduksi oleh BBPBL Lampung Capaian diukur berdasarkan jumlah produksi benih ikan laut (melalui PNBP, hibah)
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>Capaian = menjumlahkan seluruh produksi benih ikan laut</i></p> </div>
SATUAN	:	Ekor
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Produksi dan Bantuan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan setiap triwulan dengan target :

Target Triwulanan (ekor)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	80.000	150.000	162.436

		IK. 4
INDIKATOR KINERJA	:	BENIH IKAN AIR LAUT YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT OLEH BBPBL LAMPUNG (EKOR)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah benih ikan air laut yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah benih ikan air laut yang disalurkan. Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur target jumlah dari realisasi benih ikan air laut yang disalurkan.
FORMULA PERHITUNGAN	:	<p><i>capaian = Jumlah benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat</i></p>
SATUAN	:	Ekor
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Produksi dan Bantuan Benih)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

Pengukuran capaian dilakukan secara triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
150.000	300.000	700.000	1.324.831

		IK. 5
INDIKATOR KINERJA	:	SAMPEL UJI LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN IKAN AIR LAUT OLEH BBPBL LAMPUNG (SAMPEL)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sampel uji kualitas air yang dilakukan pengujian oleh di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. Parameter pengujian kualitas air meliputi : alkalinitas, pH, kesadahan, NO₂, NO₃, NH₄, PO₄, Orto phospat, TSS, kedalaman, kecerahan, suhu, salinitas, DO, TOM Capaian diukur berdasarkan jumlah sampel kualitas air yang diuji di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><i>Capaian = jml sampel kualitas air yang diuji di laboratorium kesling</i></p> </div>
SATUAN	:	Sampel
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali rendah
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja kesehatan ikan dan lingkungan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

Pengukuran capaian dilakukan pada triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
50	110	170	200

		IK. 6
INDIKATOR KINERJA	:	SAMPEL MONITORING PENYAKIT IKAN AIR LAUT YANG DIUJI OLEH BBPBL LAMPUNG (SAMPEL)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah monitoring penyakit ikan air laut yang dilakukan pengujian oleh di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. Parameter penyakit ikan meliputi : bakterial, parasit, ALT bakteri, ALT vibrio, biologi molekuler Capaian diukur berdasarkan jumlah sampel penyakit ikan yang diuji di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><i>Capaian = jml sampel penyakit ikan yang diuji di laboratorium kesling</i></p> </div>
SATUAN	:	Sampel
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali rendah
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja kesehatan ikan dan lingkungan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

Pengukuran capaian dilakukan pada triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
40	80	120	160

		IK. 7
INDIKATOR KINERJA	:	SAMPEL SURVAILLANCE RESISTENSI ANTIMIKROBA IKAN AIR LAUT (AMU/AMR) YANG DIUJI OLEH BBPBL LAMPUNG (SAMPEL)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sampel AMR yang diuji di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. Pengujian AMR menggunakan antibiotik enrofloxacin, tetracyclin, dan oxytetracyclin Capaian diukur berdasarkan jumlah sampel AMR yang diuji di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
FORMULA PERHITUNGAN	:	<p><i>Capaian = Jumlah sampel AMR yang diuji</i></p>
SATUAN	:	Sampel
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali rendah
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja kesehatan ikan dan lingkungan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

Pengukuran capaian dilakukan pada per triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
21	39	57	75

		IK. 8
INDIKATOR KINERJA	:	PAKAN IKAN YANG DIPRODUKSI UNTUK OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BBPBL LAMPUNG (KG)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh BBPBL Lampung guna menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan air laut. • Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium yang ada di BBPBL Lampung untuk memproduksi pakan ikan air laut dan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia. • capaian diukur berdasarkan jumlah pakan ikan air laut yang diproduksi
FORMULA PERHITUNGAN	:	<p><i>capaian = Jumlah pakan ikan air laut yang diproduksi BBPBL Lampung</i></p>
SATUAN	:	Kg
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Produksi dan Bantuan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

Pengukuran capaian dilakukan secara triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	2.500	4.000	6.211

		IK. 9
INDIKATOR KINERJA	:	SARANA PERIKANAN BUDI DAYA YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT OLEH BBPBL LAMPUNG (UNIT)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana budidaya ikan air tawar (bioflok dan mesin pakan) yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah unit sarana yang disalurkan. Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur target jumlah dari realisasi sarana budidaya bioflok dan mesin pakan yang disalurkan.
FORMULA PERHITUNGAN	:	<i>capaian = Jumlah bantuan bioflok dan mesin pakan yang disalurkan ke masyarakat</i>
SATUAN	:	Paket
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali rendah
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Sarana dan Prasarana)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (paket)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	35

		IK. 10
INDIKATOR KINERJA	:	BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT OLEH BBPBL LAMPUNG (KG)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> BBPBL Lampung telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi oleh BBPBL Lampung akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut. Penerima bantuan bibit rumput laut adalah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah terdaftar di dinas dan memenuhi ketentuan dalam juknis bantuan. Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat
FORMULA PERHITUNGAN	:	<i>Capaian = Jumlah bibit rumla kuljar yg didistribusikan ke masyarakat</i>
SATUAN	:	Kg
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Produksi dan Bantuan)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan secara triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2.400	4.400	6.400	9.463

		IK. 11
INDIKATOR KINERJA	:	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SATKER BBPBL LAMPUNG (PERSEN)
DEFINISI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BBPBL Lampung sampai dengan waktu pengukuran.
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BBPBL Lampung}} \times 100$ </div>
SATUAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen) : Aplikasi sidak kkp
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

Pengukuran capaian dilakukan pada setiap triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
86	86	86	86

IK. 12

INDIKATOR KINERJA : **PENILAIAN MANDIRI SAKIP BBPBL LAMPUNG (NILAI)**

DEFINISI :

- Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja

FORMULA PERHITUNGAN :

- Capaian Nilai Rekon SAKIP BBPBL Lampung berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di BBPBL Lampung dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB
- Kategori nilai SAKIP yaitu :

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

SATUAN : **Nilai**

TINGKAT VALIDITAS : **Output kendali rendah**

SUMBER DATA : **BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)**

POLA PERHITUNGAN : **Nilai Posisi Akhir**

POLARISASI : **Maximize**

PERIODE PELAPORAN : **Tahunan**

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	84,2

		IK. 13
INDIKATOR KINERJA	:	INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BBPBL LAMPUNG (NILAI)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BBPBL Lampung atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95; Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau Kurang, apabila nilai IKPA > 70 <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila BBPBL Lampung memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada BBPBL Lampung tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$ </div> <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10% <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD B Peg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD B Bar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{|/R BMod n - RPD BMod n/|}{RPD B Mod n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

1. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

2. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$

Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ROKW}}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

SATUAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	Biro Keuangan (Aplikasi OM-SPAN) (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

Pengukuran capaian dilakukan pada setiap semester dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	83	-	92,1

		IK. 14											
INDIKATOR KINERJA	:	NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BBPBL LAMPUNG (NILAI)											
DEFINISI	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.											
FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>NKPA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efektivitas (75%)</td> <td>1. Capaian Indikator RO</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td> <td>1. Penggunaan SBK</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2. Efisiensi SBK</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Formula perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} + WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} + WE_{Alokasi})$ </div> <p>Keterangan :</p> <p>NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker</p> <p>CRO : Capaian RO</p> <p>Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK</p> <p>NE_{Alokasi} : Nilai Efektivitas Alokasi</p>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Penggunaan SBK	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)											
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75											
Efisiensi (25%)	1. Penggunaan SBK	10											
	2. Efisiensi SBK	15											

W_{CRO} : Bobot Capaian RO
 $W_{Pengganaan_{SBK}}$: Bobot Penggunaan SBK
 $W_{EA_{lokasi}}$: Bobot Efisiensi Alokasi

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS IKU	:	Output kendali rendah
SUMBER DATA	:	Kementerian Keuangan (Aplikasi DJA) (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Akhir Tahun

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	71,75

		IK. 15												
INDIKATOR KINERJA	:	INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPBL LAMPUNG (INDEKS)												
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. • Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). • Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN No. 8 tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 												
FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>DEFINISI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. • Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). • Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Peraturan BKN No. 8 tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara <p>Pengukuran capaian dilakukan pada per semester dengan target :</p> <table border="1" data-bbox="554 1081 1440 1182"> <thead> <tr> <th colspan="4">Target Triwulanan (nilai)</th> </tr> <tr> <th>TW 1</th> <th>TW 2</th> <th>TW 3</th> <th>TW 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>74</td> <td>-</td> <td>81,5</td> </tr> </tbody> </table>	Target Triwulanan (nilai)				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	-	74	-	81,5
Target Triwulanan (nilai)														
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4											
-	74	-	81,5											

CARA PENGUKURAN CAPAIAN

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.

2. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sbb :

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan minimal diangkat kedlm jabatan	Pendidikan yg diperoleh pegawai (bobot nilai)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Pimpinan Tinggi	SI/DIV	25	25	20	10	10	10
		Administrator	SI/DIV	25	25	20	10	10	10
		Pengawas	DIII	25	25	20	20	10	10
	Non manajerial	JF Ketrampilan	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		JF Keahlian	SI/DIV	25	20	10	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

3. Dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal

No.	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Pimpinan Tinggi	Administrator	Pengawas	Fungsional	Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Kurang	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP setahun					
	PNS					
	- ≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	- ≤ 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	- ≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	- ≤ 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam surat Plt. Kepala BKN No. 4190/BBM 02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang IP ASN dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut

$$IPASN \text{ Pegawai} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP \text{ ASN Unit Kerja} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN seluruh pegawai}}{\text{Jumlah Pegawai ASN}}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

SATUAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	Biro SDMAO (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

		IK. 16
INDIKATOR KINERJA	:	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SATKER BBPBL LAMPUNG (NILAI)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. • Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. • Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. • Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\text{Nilai Pengawasan Kearsipan} = \sum ((\text{Jumlah Nilai Akhir PAD} \times \text{Bobot}) + (\text{Jumlah Nilai Akhir SDK} \times \text{Bobot}))$ </div>
SATUAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali rendah
SUMBER DATA	:	Pusdatin (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Manimize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	81

		IK. 17
INDIKATOR KINERJA	:	PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP SATKER BBPBL LAMPUNG (PERSEN)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Daftar rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang wajib diumumkan secara terbuka kepada publik melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai wujud transparansi RUP ini memuat informasi seperti nama paket pekerjaan, lokasi, pagu anggaran, sumber dana, metode pemilihan penyedia, dan jadwal pelaksanaan, serta disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BBPBL Lampung
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>Persentase RUP PBJ yg diumumkan di SIRUP = $\frac{\text{Nilai rencana umum PBJ diumumkan di SIRUP}}{\text{Pagu pengadaan barang jasa}} \times 100 \%$</i></p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah (nilai PAGU) paket PBJ yang dianggarkan dan diumumkan di SIRUP : mencakup paket-paket pengadaan yang telah direncanakan, memiliki alokasi anggaran (APBN/APBD), dan telah diinput serta diumumkan secara resmi melalui aplikasi SIRUP LKPP Total jumlah (nilai PAGU) seluruh paket PBJ yang dianggarkan : merujuk pada keseluruhan paket pengadaan barang/jasa yang direncanakan dalam satu tahun anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, berdasarkan dokumen anggaran yang telah disetujui (RKA, DIPA, atau APBD).
SATUAN	:	Persen
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Manimize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

Pengukuran capaian dilakukan pada triwulan dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
77	77	77	77

		IK. 18																					
INDIKATOR KINERJA	:	INDEKS PENGELOLAAN SDM SATKER BBPBL LAMPUNG (NILAI)																					
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. • Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). • Pengukuran capaian dilakukan secara tahunan 																					
FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Nilai diukur berdasarkan 5 komponen</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dokumen kebutuhan ASN</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dokumen kompetensi ASN</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dokumen layanan mutasi</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dokumen layanan ketatausahaan ASN</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Informasi ASN</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total Nilai</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Nilai	1	Dokumen kebutuhan ASN	25	2	Dokumen kompetensi ASN	20	3	Dokumen layanan mutasi	25	4	Dokumen layanan ketatausahaan ASN	15	5	Informasi ASN	15	Total Nilai		100
No	Komponen	Nilai																					
1	Dokumen kebutuhan ASN	25																					
2	Dokumen kompetensi ASN	20																					
3	Dokumen layanan mutasi	25																					
4	Dokumen layanan ketatausahaan ASN	15																					
5	Informasi ASN	15																					
Total Nilai		100																					

- Indikator capaian Indeks :

Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma

Indeks	Predikat
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)
2	Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)
3	Rata-Rata (nilai 61 – 70)
4	Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)
5	Baik (nilai 81 – 90)
6	Sangat baik (nilai > 91)

- Target Capaian Indeks Tahun 2024 : Level 3 dengan predikat rata-rata

Formulasi Perhitungan per Komponen

1. Dokumen kebutuhan ASN

$$\sum \% = \left[\sum \left(\frac{jumlah_usulan}{Jumlah_Peta_jaba\ tan} \times 100\% \right) \right] \times 25$$

Catatan : target dokumen = 3 (laporan tahunan)

2. Dokumen Kompetensi ASN

$$\sum \% = \left[\sum \left(\frac{jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\% \right) \right] \times 20$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

3. Dokumen Layanan Mutasi ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{Jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} x 100\%)] x 25$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

4. Dokumen Layanan Ketatausahaan ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{Jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} x 100\%)] x 15$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

5. Dokumen Layanan Ketatausahaan ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_usulan}{Jumlah_approve_setuju} x 100\%)] x 15$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output TK. kendali tinggi
SUMBER DATA	:	SDMAO – DJPB
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	4

		IK. 19												
INDIKATOR KINERJA	:	PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SATKER BBPBL LAMPUNG (NILAI)												
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan <i>good governance</i>. Memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi public dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi public, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri oleh pejabat PPID Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self Assesment Questionnaire (SAQ) 												
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\text{Nilai Keterbukaan Informasi Publik} = (80\% \times \text{Nilai SAQ}) + (20\% \times \text{Nilai Presentasi Uji Publik})$ </div> <ul style="list-style-type: none"> Kategori nilai yaitu : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 – 100</td> <td>Informatif</td> </tr> <tr> <td>80 – 89</td> <td>Menuju Informatif</td> </tr> <tr> <td>60 – 78</td> <td>Cukup Informatif</td> </tr> <tr> <td>40 – 59</td> <td>Kurang Informatif</td> </tr> <tr> <td>< 39</td> <td>Tidak Informatif</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	90 – 100	Informatif	80 – 89	Menuju Informatif	60 – 78	Cukup Informatif	40 – 59	Kurang Informatif	< 39	Tidak Informatif
Nilai	Predikat													
90 – 100	Informatif													
80 – 89	Menuju Informatif													
60 – 78	Cukup Informatif													
40 – 59	Kurang Informatif													
< 39	Tidak Informatif													
SATUAN	:	Nilai												
TINGKAT VALIDITAS	:	Outpot kendali tinggi												
SUMBER DATA	:	Tim PPID BBPBL Lampung (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)												
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir												
POLARISASI	:	Maximize												
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan												

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	≥81

		IK. 20
INDIKATOR KINERJA	:	PERSENTASE LAYANAN PERKANTORAN SATKER BBPBL LAMPUNG (PERSEN)
DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BBPBL Lampung
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\text{Prosentase layanan} = \frac{\text{Jumlah Permintaan layanan perkantoran}}{\text{Jumlah layanan yang telah terselesaikan}} \times 100 \%$ </div>
SATUAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	(Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	100

		IK. 21
INDIKATOR KINERJA	:	NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT KERJA YANG BERPREDIKAT MENUJU WBK (NILAI)
DEFINISI	:	<p>Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; • Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; • Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50; • Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20).
FORMULA PERHITUNGAN	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Penilaian dokumen disesuaikan Lembar Kerja Evaluasi ZI</p> </div>
SATUAN	:	Persen
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal III (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	76

		IK. 22																								
INDIKATOR KINERJA	:	INDEKS LAYANAN PERPUSTAKAAN SATKER BBPBL LAMPUNG (NILAI)																								
DEFINISI	:	Indeks pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan mengurus sesuatu, dapat diartikan sebagai mengurus atau menyelenggarakan perpustakaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1976:469)																								
FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Penghitungan melalui Survey Kepuasan Penerima Layanan Perpustakaan dengan menggunakan skala Linkert</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>Capaian = T X Pn</i></p> <p>Keterangan : T = total jumlah responden yang memilih</p> <p>Pn = pilihan angka skor Linkert</p> </div> <p>Dalam menanggapi pertanyaan dalam skala linkert, responden menunjukkan persetujuan terhadap pertanyaan dengan memilih satu jawaban yang tersedia, dengan format sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pertanyaan positif</th> <th colspan="2">Pertanyaan negatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skor 1</td> <td>Sangat tidak setuju</td> <td>Skor 1</td> <td>Sangat setuju</td> </tr> <tr> <td>Skor 2</td> <td>Tidak setuju</td> <td>Skor 2</td> <td>Setuju</td> </tr> <tr> <td>Skor 3</td> <td>Netral</td> <td>Skor 3</td> <td>Netral</td> </tr> <tr> <td>Skor 4</td> <td>Setuju</td> <td>Skor 4</td> <td>Tidak setuju</td> </tr> <tr> <td>Skor 5</td> <td>Sangat setuju</td> <td>Skor 5</td> <td>Sangat tidak setuju</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari masing-masing item dari individu tersebut</p> <p>b. Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasannya antara skor tinggi dan skor rendah</p>	Pertanyaan positif		Pertanyaan negatif		Skor 1	Sangat tidak setuju	Skor 1	Sangat setuju	Skor 2	Tidak setuju	Skor 2	Setuju	Skor 3	Netral	Skor 3	Netral	Skor 4	Setuju	Skor 4	Tidak setuju	Skor 5	Sangat setuju	Skor 5	Sangat tidak setuju
Pertanyaan positif		Pertanyaan negatif																								
Skor 1	Sangat tidak setuju	Skor 1	Sangat setuju																							
Skor 2	Tidak setuju	Skor 2	Setuju																							
Skor 3	Netral	Skor 3	Netral																							
Skor 4	Setuju	Skor 4	Tidak setuju																							
Skor 5	Sangat setuju	Skor 5	Sangat tidak setuju																							

Interpretasi Skor Perhitungan

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut :

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden

X = skor terendah likert x jumlah responden

$$\text{Rumus Index \%} = \text{Total Skor} / Y \times 100$$

Pra Penyelesaian

Sebelum menyelesaikannya kita juga harus mengetahui interval (rentang jarak) dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I).

Rumus Interval

$$I = 100 / \text{Jumlah Skor (Likert)}$$

$$\text{Maka} = 100 / 5 = 20$$

$$\text{Hasil (I)} = 20$$

(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 %
hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval:

- Angka 0% – 19,99% = Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali)
- Angka 20% – 39,99% = Tidak setuju / Kurang baik)
- Angka 40% – 59,99% = Cukup / Netral
- Angka 60% – 79,99% = (Setuju/Baik/suka)

Angka 80% – 100% = Sangat (setuju/Baik/Suka)

SATUAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
SUMBER DATA	:	JFT Pustakawan (Penanggung Jawab : Tim Kerja Dukungan Manajemen)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun dengan target :

Target Triwulanan (%)			
TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
-	-	-	3

PENUTUP

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi seluruh unit kerja agar pelaksanaan pengelolaan kinerja berjalan secara sistematis, terukur, konsisten, dan akuntabel.

Dengan adanya Manual IKU, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami definisi operasional indikator, metode penghitungan, sumber data, serta mekanisme pelaporan. Keseragaman tersebut sangat penting dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Manual IKU ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan strategis, regulasi, struktur organisasi, maupun penetapan indikator kinerja baru. Evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi indikator terhadap sasaran strategis organisasi.

Akhirnya, keberhasilan implementasi IKU sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan kinerja yang baik, diharapkan organisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas program, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan.